



FILOSOFI PENDIDIKAN YANG INTEGRAL DAN HUMANIS DALAM PERSPEKTIF MANGUNWIJAYA

Agustinus Wisnu Dewantara

PERAN KAUM DEWASA DALAM MENINGKATKAN KERASULAN DI BIDANG POLITIK BAGI KAUM MUDA DALAM TERANG DEKRIT APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 12

Ola Rongan Wilhelmus dan Yuvinus Sujiman

PEMBINAAN ROHANI KATOLIK TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MADIUN

Agustinus Supriyadi dan Vinansius Fentius Lase

DEVOSI KEPADA BUNDA MARIA BERDASARKAN DOKUMEN MARIALIS CULTUS DAN PELAKSANAANNYA DI PAROKI MATER DEI MADIUN

Don Bosco Karnan Ardijanto dan Ignatius Damar Putra

KOMUNITAS BASIS GEREJANI SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN IMAN UMAT DI PAROKI MATER DEI MADIUN

Aloysius Suhardi dan Elisabet Sababak

PERSEPSI MAHASISWA STKIP WIDYA YUWANA MADIUN TENTANG HUBUNGAN ANTARA PEMBINAAN SPIRITUALITAS DAN PEMBINAAN KARYA PASTORAL

Juventius Fusi Nusantoro dan Antonia Bamban Puspitasari

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Agustinus Wisnu Dewantara

Penyunting Pelaksana

DB. Karnan Ardijanto

Agustinus Supriyadi

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhemus

Armada Riyanto

Sekretaris

Aloysius Suhardi

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554

Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).

**PERAN KAUM DEWASA DALAM
MENINGKATKAN KERASULAN
DI BIDANG POLITIK BAGI KAUM MUDA
DALAM TERANG DEKRIT
*APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 12***

Ola Rongan Wilhelmus dan Yuvinus Sujiman
STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

Participation in politics is the rights and obligations of citizens. The Church and the Government has been providing a wide range of container construction for young people. This aims to help young people become responsible individuals, including in the exercise of their rights and obligations in the field of politics. The Second Vatican Council Decree Apostolicam Actuositatem through article 12 confirms that adults play a role built dialogue, give example and wise advice, and encourage young people to the apostolate, including in the field of politics.

The outline of the research issues include: what does political and Ministry, whether politics is part of the Apostolic Church, how young people's interest and involvement in the political sphere, and how implementation of the role of adults in improving the Ministry in the field of politics for young people based on the mandate of the Decree Apostolicam Actuositatem article 12. Based on the outline of the issue, this research aims to describe the sense of politics and Ministry, describing politics as part of the Church's apostolic work, analyzing the interest and involvement of young people in the political sphere, and analyze the implementation role of adults in improving the Ministry in the field of politics for young people.

The research was carried out in may 2015 in the parish of St. Cornelius Parish and Mater Dei of Madiun. The researchers used a qualitative research method. The

respondents of the research consisted of six young people and four adults. The process of collecting data using the method of interview.

The results showed that politics is an attempt to achieve common prosperity. And Ministry is an attempt to achieve a common prosperity based on the teachings of the Church. Politics is part of the Apostolic Church. However, young people are less interested and involved in political activities. In addition, adults have not been able to carry out their task in improving the Ministry in the field of politics for young people effectively and optimally.

Keyword: *Adults, Politics, Youth, Apostolicam Actuositatem*

I. Pendahuluan

Aristoteles berkata bahwa manusia secara alamiah adalah *zoon politicon* (mahluk politik). Partisipasi di dalam dunia politik merupakan realisasi tertinggi dari kodrat manusia. Menjadi warga berarti berpartisipasi secara aktif di dalam perbincangan publik, instansi-instansi resmi, dan membela *polis* (Robert, 2007: 21). Perkembangan politik, khususnya di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan tertentu dalam kehidupan bersama. Berkat partisipasi aktif warga dalam bidang politik, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya hingga kini diakui oleh dunia sebagai negara yang telah merdeka.

Dewasa ini, ada begitu banyak wadah pembinaan yang disediakan untuk menunjang efektifitas partisipasi warga negara, khususnya orang muda, baik di lingkup kategorial maupun teritorial paroki. Hal ini menjadi penting mengingat partisipasi dalam bidang politik merupakan hak setiap warga negara. Philips Tangdilintin (2008: 16) mengatakan bahwa persoalan yang seringkali muncul terkait upaya meningkatkan partisipasi warga negara melalui beragam wadah tersebut ialah adanya kesenjangan antar generasi, dalam hal ini antara kaum dewasa dengan kaum muda. Kaum muda hanya dianggap sebagai *the churchment of tomorrow* (warga masa depan) yang nanti akan diberi peran jika sudah dianggap matang dan siap.

Tangdilintin selanjutnya mengatakan bahwa untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab politik bagi masyarakat yang apatis, khususnya kaum muda sebagai akibat dari adanya kesenjangan dalam hubungan mereka dengan kaum dewasa, tentu saja bukan hal yang mudah. Di tengah adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan harus muncul sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi paradigma kaum muda terhadap politik sekaligus mengubah berbagai bentuk “paradigma negatif” tentang orang muda.

Politik merupakan salah satu bidang kerasulan Gereja melalui kaum awam. Kaum awam juga merupakan warga negara. Mereka hidup di dalam suatu sistem ketatanegaraan tertentu di mana mereka memiliki hak dan kewajiban politik sebagaimana warga negara pada umumnya. Berkaitan dengan hal ini, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa partisipasi kaum awam dalam bidang politik bukan sekedar pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan sebagai salah satu bentuk perwujudan panggilan untuk merasul. Partisipasi politik kaum awam harus senantiasa ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan semua warga, dengan mendorong pemerintah untuk bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah moral (AA 14).

Kaum awam yang dimaksud ialah kaum dewasa usia antara 40-60 tahun yang sedang ataupun pernah terlibat aktif dalam dunia politik praktis (politisi). Mereka mempunyai peran untuk memberikan dorongan kepada kaum muda untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggungjawab, termasuk dalam hal kegiatan dan kehidupan berpolitik (bdk. Hurlock, 1990:325-374). Kaum muda merupakan kekuatan penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik zaman sekarang. Di satu pihak, mereka sedang mengalami proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, emosional, sosial, moral, dan religius dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya (Mangunhardjana, 1986:12), dan di pihak lain, mereka dituntut untuk mengambil sikap terhadap rumitnya kondisi politik bangsa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gereja melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 12 menegaskan bahwa kaum dewasa berperan membangun dialog, memberikan teladan dan nasihat yang bijaksana, dan mendorong kaum muda untuk merasul, termasuk di bidang politik. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan metode

pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara, baik verbal maupun tertulis. Penelitian dilaksanakan di wilayah Paroki Santo Cornelius dan Paroki Mater Dei Madiun.

II. PERAN KAUM DEWASA DALAM MENINGKATKAN KERASULAN DI BIDANG POLITIK BAGI KAUM MUDA DALAM TERANG DEKRIT *APOSTOLICAM ACTUOSITATEM* ARTIKEL 12

2.1. Arti Politik

2.1.1. Arti Politik secara Umum

Politik seringkali dipahami secara sempit dan keliru dengan konotasinya yang sangat negatif. Pemahaman yang salah tentang politik muncul sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan politik oleh para pegiat (politisi). Berkaitan dengan hal ini, Rocky Gerung (Robert dan Agustinus, 2008: viii) mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berada dalam sebuah konstruksi sosial yang “anti politik”.

Politik yang dalam bahasa Inggrisnya *politics* mengarah kepada sebutan “negara kota”, yang dalam konteks Yunani klasik disebut *polis*. Berkaitan dengan *polis*, ada pula istilah Yunani lainnya yang membantu pemahaman akan istilah politik, seperti *politicos* (menyangkut warga negara), *polites* (seorang warga negara), *politicia* (kewarganegaraan), dan *politicon* (karangan Aristoteles, murid Plato tentang kewarganegaraan). Berdasarkan asal kata tersebut, Lorens Bagus (2002:857) menyimpulkan bahwa politik berarti sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, yakni perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara, dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan relasi antar bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Adolf Heuken (1994:21) dan Eddy Kristiyanto (2008:2) berpendapat bahwa politik merupakan seni mengelola, mengurus, dan merawat negara dan pemerintahan dalam kaitannya dengan tanggung jawab untuk melayani rakyat. Isidores Lilijawa (2007:27-28) mengatakan bahwa pandangan mengenai politik sebagai suatu seni dapat didasarkan pada kata *politike* pada zaman Yunani klasik yang senantiasa dipadukan dengan kata *techne* yang berarti teknik

atau seni mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat atau kelompok.

Berkaitan dengan konteks Yunani tersebut, Aristoteles (2007:8) memandang manusia sebagai *zoon politicon* (mahluk politik). Konsep tersebut muncul atas dasar bahwa manusia hidup dalam kebersamaan dengan manusia lainnya di dalam suatu *polis* (dimensi sosial). *Polis* (negara kota) merupakan kreasi alam yang terbentuk dengan sendirinya ketika manusia menciptakan kebersamaan itu. Hanya di dalam *polis* itulah, manusia dapat mencapai nilai moral yang paling tinggi.

Robertus Robert (2007:93-96) mengatakan bahwa konsepsi Aristoteles mengenai manusia sebagai *zoon politicon* tersebut mengandung tiga makna sebagai berikut: pertama, *zoon politicon* dalam pengertian Aristoteles pertama-tama menunjuk pada hakikat manusia yang secara alamiah selalu berkehendak untuk merealisasikan kapasitasnya dalam kehidupan berkomunitas melalui upaya untuk mewujudkan keadilan bersama. Politik dalam pengertian Aristoteles selalu berisi tentang tindakan yang berorientasi pada dua hal esensial, yakni menciptakan komunitas dan mewujudkan keadilan. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan politik hanya jika ditujukan untuk merealisasikan kesempurnaan dalam kehidupan bersama. Kedua, terdapat dua elemen prosedural sebagai persyaratan dalam pelaksanaan politik antara lain: urusan politik adalah urusan *speech action* (tindakan komunikatif) dan tindakan politik dilaksanakan dalam prosedur sambung rasa yang persuasif dan mengandalkan komunikasi, bukan dengan kekerasan. Setiap tindakan kekerasan berarti menolak politik itu sendiri. Ketiga, esensi politik adalah adanya pemisahan tegas antara politik sebagai urusan *polis* dengan urusan-urusan *oikos* (ekonomi). Pemisahan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberi batasan agar pertimbangan-pertimbangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pengaturan-pengaturan tatanan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dalam situasi yang bebas dari bias kepentingan ekonomi dan keluarga.

Robertus Robert (2007:21) selanjutnya mengatakan bahwa sifat alamiah manusia sebagai *zoon politicon* menimbulkan konsekuensi bahwa menjadi warga berarti berpartisipasi secara aktif dalam perbincangan publik, instansi-instansi resmi, dan membela *polis*. Politik merupakan hak kodrati setiap warga. Politik merupakan kesempatan dan kemungkinan yang harus dimiliki setiap orang untuk

dapat hidup dan bergerak di muka umum, membina persekutuan hidup dengan orang lain, terlibat dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, dan menikmati hasil perjuangan masyarakat (Lilijawa, 2007:29).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik sebenarnya merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, yakni seni mengelola, mengurus, dan merawat negara dan pemerintahan, dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan relasi antar bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara dalam kaitannya dengan tanggung jawab untuk melayani rakyat. Politik dalam pelaksanaannya harus memerhatikan beberapa hal penting berikut: yaitu: berorientasi pada perwujudan keadilan dilaksanakan dalam prosedur sambung rasa yang persuasif, dan memisahkannya dengan urusan keluarga atau ekonomi. Konsekuensi dari sifat alamiah manusia sebagai *zoon politicon* terungkap dari adanya partisipasi aktif setiap warga dalam perbincangan publik, instansi-instansi resmi, dan pembelaan terhadap *polis*, bukan justru bersikap apatis terhadap politik.

2.1.2. Arti Politik dalam Perspektif Kristiani

Eddy Kristiyanto (2008:97) mengatakan bahwa konsep tentang *sakramen politik* muncul karena melihat adanya perpaduan antara fakta dunia, agama, tanggung jawab, dan harapan-harapan setiap anggota suatu kelompok dalam kehidupan bersama. Politik menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Berpolitik menjadi suatu keharusan bagi setiap orang. Politik sebagai sakramen berarti eksistensinya bermakna sebagai tanda dan sarana yang mengantar manusia kepada kebebasan dan keselamatan. Politik perlu dipandang sebagai sakramen demi keselamatan semua orang. Berpolitik merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap orang beragama.

Paulinus Yan Olla (2014:14-18) mengatakan bahwa Gereja meyakini bahwa semua orang dipanggil untuk mengikuti Yesus dalam upaya mewujudkan keselamatan. Keselamatan yang diwujudkan Yesus itu tidak hanya terjadi pada saat kehidupan kelak setelah kematian, melainkan juga pada saat kita masih berziarah di dunia ini. Keselamatan itu dapat diwujudkan melalui berbagai bidang dalam kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, teknik, komunikasi, kemasyarakatan, politik, relasi dengan komunitas

internasional, maupun relasi antar budaya dan antar bangsa. Dengan demikian, politik sebagai salah satu bidang dalam kehidupan manusia dapat disebut sebagai *jalan kesucian*.

Selanjutnya, Paulinus Yan Olla (2014:68) menjelaskan bahwa keselamatan yang diwartakan oleh Yesus itu bersifat integral. Artinya, keselamatan itu diwujudkan melalui berbagai bidang dalam kehidupan manusia (termasuk politik) dan menjangkau semua orang. Oleh karena itu, keterlibatan semua anggota Gereja dalam kegiatan politik berkaitan erat dengan apa yang disebut spiritualitas, yakni “Roh” (Latin: *Spiritus*) Allah. Kegiatan politik mengandaikan adanya relasi antara Roh Allah dengan perwujudannya secara umum oleh semua anggota Gereja melalui partisipasi politik. Jadi, spiritualitas politik merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengalaman orang beriman akan Allah melalui keterlibatan aktif dalam bidang sosial dan politik.

2.2. Kerasulan di Bidang Politik

Konsili Vatikan II melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 2 memberikan lukisan mengenai kerasulan sebagai berikut:

“Gereja didirikan, agar semua orang mengambil bagian dalam penebusan dan keselamatan dan lewat mereka dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus dengan penyebaran kerajaan Kristus yang di seluruh bumi demi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kegiatan Tubuh Mistik yang terarah pada tujuan itu disebut kerasulan dan Gereja mewujudkannya dengan pelbagai cara lewat para warganya; karena panggilan Kristiani pada hakekatnya sekaligus adalah panggilan untuk merasul. Seperti dalam susunan tubuh yang hidup tiada anggota tinggal pasif belaka, melainkan dengan partisipasinya dalam kehidupan Tubuh Kristus seluruh Tubuh mengembangkan pertumbuhan tubuh dengan sumbangan setiap anggota (Ef 4:6).”

Kerasulan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Gereja untuk mengambil bagian dalam karya penebusan dan keselamatan supaya dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus demi kemuliaan Allah Bapa.

Umat katolik merupakan warga Gereja sekaligus warga negara. Mereka hidup di dalam suatu sistem ketatanegaraan tertentu,

di mana mereka memiliki hak dan kewajiban politik sebagaimana warga negara pada umumnya. Partisipasi politik bukan sekedar hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga merupakan bagian dari panggilan untuk merasul. Partisipasi politik umat katolik harus senantiasa ditujukan pada tercapainya kesejahteraan yang sejati bagi semua warga, dengan mendorong pemerintah untuk bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah moral, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 14 berikut ini:

“Dalam berbakti kepada bangsa dan dalam menunaikan tugas-tugasnya dengan setia, Umat Katolik hendaknya menyadari kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan umum yang sejati. Hendaknya mereka berusaha berpengaruh dengan bobot pandangan mereka, sehingga pemerintah dijalankan dengan adil dan hukum-hukum selaras dengan tuntutan-tuntutan moral serta menunjang kesejahteraan umum.”

Ramlan Surbakti (1992:142) menjelaskan bahwa partisipasi kegiatan politik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Beberapa contoh tindakan partisipasi aktif antara lain: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan suatu kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif seperti menaati, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah tanpa ada upaya untuk bersikap kritis. Ada pula bentuk-bentuk tindakan anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Ramlan Surbakti (1992:143) mengutip pendapat Milbrath dan Goel yang mengatakan bahwa partisipasi politik dibedakan menjadi empat kategori. Pertama, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik (apatis). Kedua, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilihan Umum (spektator). Ketiga, mereka yang terlibat aktif dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis,

aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat (gladiator). Keempat, orang yang terlibat dalam partisipasi politik non-konvensional (pengkritik).

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi politik individual seperti seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi politik secara kolektif seperti ikut serta dalam Pemilihan Umum disebut sebagai Partisipasi politik kolektif yang konvensional. Ada pula yang disebut partisipasi politik non-konvensional (agresif) seperti pemogokan secara tidak sah, menguasai bangunan umum, dan kerusuhan (Ramlan Surbakti, 1992: 143-144).

2.3. Peran Kaum Dewasa dalam meningkatkan Kerasulan di Bidang Politik bagi Kaum Muda menurut Dekrit *Apostolicam Actuositatem* Artikel 12

2.3.1. Kaum Dewasa

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana (2008:35) mengatakan bahwa konsep tentang kedewasaan dapat dipahami dari 4 (empat) aspek yaitu jasmani, sosial, psikologis (kejiwaan), dan pedagogis atau normatif. Seseorang dikatakan dewasa secara jasmani ketika ia telah mampu menghasilkan keturunan, telah berada pada masa *akil baliq* (tahu membedakan baik dan buruk). Seseorang dikatakan dewasa secara sosial ketika ia telah mampu hidup mandiri dan tidak lagi tergantung secara sosial-ekonomi pada orang tuanya. Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis ketika ia telah mampu mengembangkan segenap potensi kejiwaannya (pikiran, emosi, dan kemauan) secara serasi, selaras, dan seimbang, sehingga mampu menghadapi berbagai jenis persoalan hidup. Orang yang dewasa secara psikologis memiliki pikiran yang obyektif, kritis, logis, sistematis, dan stabil dalam emosional. Seseorang dikatakan dewasa secara pedagogis atau normatif ketika ia telah hidup dengan memerhatikan nilai-nilai kesusilaan. Artinya, ia mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Orang yang dewasa secara normatif mampu hidup berdasarkan hati nuraninya dan memiliki pedoman hidup yang jelas. Maka, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila hidup secara baik dan benar, dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bertindak sesuai dengan nilai-nilai/norma tentang kebenaran, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Istilah dewasa merujuk pada mereka yang sedang berada pada periode perkembangan masa dewasa madya. Elizabeth B. Hurlock (1990:246) mengatakan bahwa salah satu periode perkembangan masa dewasa ialah masa dewasa madya. Masa dewasa madya terjadi pada rentang usia 40-60 tahun. Usia dewasa madya merupakan usia transisi dari *adulthood* ke masa tua. Transisi itu terjadi baik pada fungsi fisik maupun psikisnya. Kaum dewasa dengan demikian ialah sekelompok orang yang berusia antara 40-60 tahun, melakukan hal-hal yang baik dan benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi orang lain, hidup sesuai dengan nilai-nilai/norma tentang kebenaran, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Liege (1982:3-6) mengatakan bahwa konsep kedewasaan seperti diuraikan di atas disebut kedewasaan manusiawi. Realitas dunia modern dengan segala kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya harus dijadikan sebagai faktor pendorong untuk mencapai kedewasaan tersebut. Selain itu, ada pula yang disebut sebagai kedewasaan kristiani. Seseorang dapat dikatakan dewasa secara kristiani jika memiliki keyakinan akan Injil yang kemudian membantunya untuk semakin termotivasi menerima seluruh realitas dan dimensi kehidupan secara integral dan tahan lama serta memiliki sikap kerendahan hati yang sejati sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan dan bersandar pada keyakinan yang mendalam akan Tuhan.

Kedewasaan manusiawi merupakan syarat mutlak untuk sampai pada kedewasaan kristiani. Seseorang yang ingin dewasa secara kristiani haruslah terlebih dahulu berusaha melalui kedewasaan manusiawi dan tuntutan ini seringkali tidak dapat dipenuhi. Hal ini terjadi karena kedewasaan memerlukan adanya kesadaran pribadi bahwa kebanyakan orang zaman sekarang tidak mampu menunaikan tugas yang dituntut dari padanya, terutama ketika berhadapan dengan aneka persoalan yang terjadi dalam kehidupan bersama. Elizabeth B. Hurlock (1990:325) mengatakan bahwa salah satu tugas perkembangan dewasa madya ialah membantu orang muda menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab.

2.3.2. Kaum Muda

Agustinus Supriyadi (2012:5) dalam tulisannya mengatakan bahwa kaum muda adalah mereka yang berusia 13-35 tahun dan belum menikah, sambil memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Dalam hal ini, KWI hendak menampilkan kaum muda Katolik

berdasarkan sudut pandang yang lebih luas jika dibandingkan dengan muda-mudi Katolik, yakni mereka yang termasuk kelompok remaja (usia SLTP) hingga Kelompok Muda Karya (KMK). Gereja memandang kaum muda Katolik tidak berdasarkan batasan kelompok usia, melainkan sebagai sebuah komunitas yang memiliki potensi untuk bertumbuh, berkembang, dan berperan serta secara aktif dalam kehidupan Gereja dan masyarakat. Mereka adalah suatu komunitas yang beranggotakan pribadi-pribadi berjiwa pembaharu.

Kaum muda merupakan bagian dari keseluruhan bangsa ini. Oleh karena itu, selain bergelut dengan beberapa persoalan yang khas dengan kondisi mereka, kaum muda tidak dapat dipisahkan dari aneka persoalan yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Pola pikir mereka pun akan sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Saat ini, peran kaum muda di bidang sosial dan juga politik semakin penting. Kaum muda merupakan pribadi-pribadi yang memiliki gairah hidup dan semangat kerja yang tinggi, sanggup memikul tanggung jawab sendiri, dan ingin memainkan peran mereka dalam kehidupan sosial dan budaya. Jika gairah itu diresapi oleh semangat Kristus dan dijiwai sikap patuh dan cinta kasih terhadap para Gembala Gereja, maka mereka akan membuahkan hasil yang melimpah (AA 12).

Philips Tangdilintin (2008:27-28) mengatakan, generasi muda dapat mengubah jalannya sejarah suatu negara. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan gerakan reformasi 1998 menjadi tonggak dan bukti kekuatan mereka karena ciri-ciri potensi berikut: pertama, dinamis. Gairah dan semangat hidup yang membara mendorong kaum muda untuk senantiasa dinamis. Jiwa muda adalah semangat hidup dalam taufan dan badai (*sturm and drang*), sarat dengan gelora hidup yang harus menemukan penyaluran yang tepat. Hal ini mendorong mereka untuk bertualang dan bereksperimen dalam upaya mencari nilai-nilai baru karena tidak ingin didikte oleh zamannya atau oleh generasi terdahulu. Kaum muda cenderung berorientasi kepada masa depan (*future-oriented*) dan dipenuhi dengan cita-cita. Semangat muda dan idealismenya membuat kaum muda mengharapkan masa depan yang lebih baik. Mereka terus berusaha untuk mewujudkan masa depan tersebut, karena merekalah penentu masa depan. Kaum muda tidak canggung bersikap dan bertindak berani dengan didasarkan pada analisa kritis rasional untuk membongkar, melawan, dan menghancurkan struktur-struktur ketidakadilan dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh kaum muda seperti telah diuraikan di atas dapat menjadikan mereka sebagai

pembaharu dalam kehidupan bersama jika diolah sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal kegiatan dan kehidupan berpolitik.

Ada begitu banyak wadah pembinaan yang disediakan bagi orang muda, baik di tingkat teritorial paroki maupun lingkup kategorial, salah satunya ialah OMK. Wadah OMK di tingkat teritorial paroki terdiri dari orang-orang muda katolik wilayah dan lingkungan. Kemudian, dalam konteks komunitas OMK di lingkup kategorial, mereka berkumpul berdasarkan adanya kesamaan bakat atau minat. Misi besar Gereja mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia akan semakin terasa dengan adanya gerak aktif dari Orang Muda Katolik. Modal berupa wadah yang tersedia bagi Orang Muda Katolik memang besar, tetapi masalahnya adalah apakah itu sudah sungguh dimanfaatkan dengan efektif? Apakah terdapat jurang yang sangat lebar antara fakta dan ideal? Untuk itu, Gereja haruslah senantiasa mengusahakan efektifitas pembinaan bagi Orang Muda Katolik. Gereja harus memberikan perhatian dan menanamkan modal yang besar untuk pelayanan kaum muda. Gereja melalui kaum awam dewasa, dalam hal ini para politisi katolik perlu mengusahakan pembinaan bagi kaum muda sembari mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap berpotensi dapat menghambat proses pembinaan mereka.

2.3.3. Dekrit *Apostolicam Actuositatem*

Konsili Vatikan II berlangsung pada masa kepemimpinan Paus Yohanes XXIII, yang kemudian diteruskan oleh Paus Paulus VI. Konsili ini melahirkan ide pembaharuan sehingga keberadaan Gereja senantiasa aktual di tengah perubahan, tuntutan, dan tantangan zaman. Salah satu ide pembaharuan yang muncul ialah bergesernya gambaran Gereja klerikal kepada gambaran Gereja Umat Allah. Pergeseran tersebut sekaligus menghapus sifat piramidal Gereja, yang menempatkan hierarki di atas seluruh umat (Tom Jacobs, 1987:24).

Gereja berada di tengah dunia yang senantiasa mengalami perubahan. Seiring dengan terjadinya perubahan tersebut, persoalan-persoalan baru muncul sebagai dampak negatif dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, dan relasi antar manusia yang menuntut adanya usaha penanganan segera. Munculnya persoalan-persoalan baru tersebut menuntut adanya kerasulan yang sepadan. Namun, tidak semua medan kerasulan dapat dimasuki oleh para gembala

umat. Maka, kaum awam dengan perannya yang khas, yakni hidup di tengah masyarakat dan urusan-urusan duniawi (AA 2) didorong untuk menghadirkan wajah Gereja yang peduli dan terlibat di tengah permasalahan dunia.

Mengingat pentingnya peran kaum awam dalam karya kerasulan Gereja di tengah dunia, Konsili Vatikan II melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 1 memberikan penegasan sebagai berikut:

“Suatu tanda mendesakny kebutuhan yang bermacam-macam yakni karya Roh Kudus, yang dewasa ini menjadikan kaum awam semakin sadar akan tanggung jawab mereka, dan di mana-mana mendorong mereka untuk membaktikan diri kepada Kristus dan Gereja.”

Dekret yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II pada tanggal 18 November 1965 ini memberikan ruang sekaligus ajakan bagi kaum awam untuk berpartisipasi secara sadar dan aktif dalam kegiatan kerasulan di tengah dunia. Dekret ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi kaum awam dalam menjalankan karya kerasulan mereka di dalam Gereja maupun masyarakat.

Peran kaum awam sangat penting. Sebab, kerasulan para gembala Gereja tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal jika tanpa keterlibatan kaum awam (AA 10). Pengembangan karya hidup menggereja tidak mungkin hanya ditangani oleh para imam. Ada banyak hal yang harus ditangani sementara para imam sendiri tidak memiliki kompetensi mencukupi pada bidang-bidang yang selama ini menjadi bidang para awam. Konsili Suci melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 1 memberikan fokus perhatiannya pada karya kerasulan kaum awam seperti dijelaskan berikut ini:

“Dalam dekret ini Konsili menjelaskan hakikat, sifat-sifat serta keanekaan kerasulan awam, dan menguraikan azas-azas dasarnya, pun juga menyampaikan petunjuk-petunjuk pastoral untuk melaksanakan secara lebih tepat guna. Hendaknya itu semua dipandang sebagai kaidah-kaidah dalam meninjau kembali hukum kanonik sejauh menyangkut kerasulan awam.”

Kerasulan awam dapat dimengerti dengan cara memahami tentang Gereja serta tujuan keberadaannya. Gereja digambarkan sebagai Tubuh Mistik Kristus, di mana kita sebagai anggota dalam

satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala-Nya (LG 7). Gereja hadir demi satu tujuan, dan untuk mencapainya diperlukan keterlibatan seluruh anggota tubuh seperti dijelaskan dalam dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 2 berikut ini:

“Gereja diciptakan untuk menyebarluaskan kerajaan Kristus di mana-mana demi kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian mengikutsertakan semua orang dalam penebusan yang membawa keselamatan, dan supaya melalui mereka seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Semua kegiatan Tubuh Mistik, yang mengarah kepada tujuan itu disebut kerasulan. Kerasulan itu dilaksanakan oleh Gereja melalui semua anggotanya, dengan berbagai cara. Sebab panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasul juga. Seperti dalam tata susunan tubuh yang hidup, tidak satupun anggota bersifat pasif melulu, melainkan beserta kehidupan tubuh juga ikut menjalankan kegiatannya, begitu pula dalam tubuh Kristus, yakni Gereja, seluruh tubuh menurut kadar pekerjaan masing-masing anggotanya mengembangkan tubuh.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerasulan itu merupakan panggilan Kristiani yang melibatkan semua anggota Gereja dalam rangka menyebarkan kerajaan Kristus, baik dalam Gereja sendiri maupun di tengah dunia (masyarakat) sehingga semua orang dapat mengalami keselamatan.

Gereja dituntut untuk dapat menjalankan beraneka pelayanan, sesuai dengan kebutuhan di medan kerasulan. Untuk itu, partisipasi semua anggota Gereja berdasarkan kewenangan dan kemampuannya masing-masing merupakan hal yang sangat penting. Para rasul dan kaum tertahbis berperan dalam tri tugas Kristus, atas nama dan kuasa-Nya. Sedangkan kaum awam sebagai anggota Gereja juga mengambil bagian dalam tugas tersebut dengan menjalankan perannya dalam perutusan seluruh Umat Allah di dalam Gereja dan di tengah dunia. Kaum awam memperoleh arti pentingnya kerasulan berdasarkan ciri khas status hidupnya, yakni hidup di tengah masyarakat dengan urusan-urusan duniawi. Kaum awam dipanggil oleh Allah untuk dijiwai semangat Kristiani, ibarat ragi, menunaikan kerasulan mereka di tengah dunia (AA2).

Dekret *Apostolicam Actuositatem* menempatkan kaum muda menjadi salah satu sasaran bidang kerasulan. Peran mereka dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, dan politik semakin terasa. Sementara itu, sebagai generasi yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, mereka belum mampu sepenuhnya memikul tanggung jawab di tengah masyarakat yang semakin kompleks dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan seiring perubahan zaman. Semangat tinggi dan realita yang mewarnai kehidupan kaum muda sungguh menarik perhatian Gereja. Oleh karena itu, Gereja melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 12 menjelaskan sebagai berikut:

“Kaum muda merupakan kekuatan yang amat penting dalam masyarakat zaman sekarang. Dari hari ke hari peran mereka di bidang sosial dan juga politik semakin penting. Padahal agaknya mereka kurang mampu menanggung beban-beban baru dengan baik. Bertambah pentingnya peran mereka dalam masyarakat itu menuntut dari mereka kegiatan merasul yang sepadan. Sifat-sifat alamiah merekapun memang sesuai untuk menjalankan kegiatan itu. Sementara kesadaran akan kepribadian mereka bertambah masak, terdorong oleh gairah hidup dan semangat kerja yang meluap, mereka sanggup memikul tanggung jawab sendiri, dan ingin memainkan peran mereka dalam kehidupan sosial dan budaya. Bila gairah itu diresapi oleh semangat Kristus dan dijiwai sikap patuh dan cinta kasih terhadap para Gembala Gereja, maka boleh diharapkan akan memperbuah hasil yang melimpah. Mereka sendiri harus menjadi rasul-rasul pertama dan langsung bagi kaum muda, dengan menjalankan sendiri kerasulan di kalangan mereka, sambil mengindahkan lingkungan sosial kediaman mereka. Hendaknya kaum dewasa dalam suasana persahabatan berusaha menjalin dialog dengan kaum muda, sehingga dengan mengatasi jarak umur mungkinlah kedua pihak saling mengenal, dan saling bertukar kekayaan masing-masing. Hendaknya kaum dewasa terutama dengan teladan, dan bila ada kesempatan dengan nasehat yang bijaksana serta bantuan yang tepat guna, mendorong kaum muda untuk merasul. Dipihak lain hendaknya kaum muda memupuk sikap

hormat dan kepercayaan terhadap kaum dewasa. Dan meskipun secara alamiah mereka cenderung ke arah hal-hal baru, hendaknya mereka menghargai tradisi-tradisi yang terpuji sebagaimana harusnya.”

Sadar akan potensi yang dimiliki kaum muda, maka Gereja perlu memanggil “Gereja muda” untuk berpartisipasi dalam pengudusan tata dunia dengan semangat Kristiani. Hendaknya kaum muda menyadari bahwa panggilan itu secara istimewa ditujukan kepada mereka, dan menyambutnya penuh kegembiraan dan kebesaran jiwa (AA 33).

Umat Katolik merupakan warga Gereja sekaligus warga negara. Mereka hidup di dalam suatu system ketatanegaraan tertentu, di mana mereka memiliki hak dan kewajiban politik sebagaimana warga negara pada umumnya. Namun, bagi umat Katolik, partisipasi politik bukan sekedar hak dan kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga merupakan bagian dari panggilan untuk merasul. Partisipasi politik umat Katolik harus senantiasa ditujukan pada tercapainya kesejahteraan semua warga, dengan mendorong pemerintah untuk bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah moral, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II melalui dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 14 berikut ini:

“Dalam berbakti kepada bangsa dan dalam menunaikan tugas-tugasnya dengan setia, Umat Katolik hendaknya menyadari kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan umum yang sejati. Hendaknya mereka berusaha berpengaruh dengan bobot pandangan mereka, sehingga pemerintah dijalankan dengan adil dan hukum-hukum selaras dengan tuntutan-tuntutan moral serta menunjang kesejahteraan umum.”

2.3.4. Peran Kaum Dewasa dalam meningkatkan Kerasulan di Bidang Politik bagi Kaum Muda menurut Dekret *Apostolicam Actuositatem* Artikel 12

Noprizal (Jambi *Update*, 03 Februari 2014) mengatakan bahwa keteladanan dalam berpolitik merupakan suatu hal penting dan sangat didambakan masyarakat. Keteladanan berpolitik merupakan suatu hal yang sangat penting. Kondisi riil politik di Indonesia menunjukkan bahwa tidak banyak diantara para elite politik yang dapat dijadikan

teladan. Kondisi ini mendesak kaum dewasa yang terlibat dalam politik praktis (politisi) untuk memberikan teladan yang baik dalam berpolitik, khususnya kepada kaum muda. Sebab, mereka adalah wajah Gereja di tengah dunia.

Keteladanan tersebut dapat diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keteladanan yang dapat diberikan secara langsung antara lain melalui kegiatan pembinaan politik bagi kaum muda. Sedangkan keteladanan yang dapat diberikan secara tidak langsung antara lain meragakan perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama (rakyat) di atas kepentingan pribadi. Berkaitan dengan situasi rill politik saat ini seperti telah diuraikan di atas, kaum muda sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentu juga akan terpengaruhi, baik dari segi pola pikir maupun cara hidup. Situasi rill politik tersebut seringkali membentuk pribadi kaum muda yang apatis terhadap politik. Bagi mereka, politik seakan-akan seperti sesuatu yang kotor dan menjijikkan sehingga dianggap layak untuk di jauhi. Hal ini menjadi penting mengingat perlunya usaha Gereja, dalam hal ini kaum awam dewasa dalam meningkatkan kerasulan kaum muda di bidang politik bagi kaum muda. Jadi, kaum muda memerlukan pemahaman yang sebagaimana mestinya terkait dengan politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja.

Philips Tangdilintin (2008: 27) mengatakan bahwa pendekatan kepada kaum muda perlu dilakukan dari sisi positif. Artinya, segi-segi positif yang potensial dalam diri mereka sedapat mungkin diangkat karena mereka pada hakikatnya adalah manusia yang baik adanya. Pendekatan dari sisi negatif tentu tidak akan membawa hasil yang baik, melainkan justru membuat mereka menjadi merasa dimusuhi dan menjaga jarak. Sebab, para pembina biasanya cenderung terjebak dalam pendekatan psikologis semata sehingga gagal membangun karakter kaum muda. Maka, pembinaan kaum muda akan berjalan dengan lebih intensif dan tepat sasaran jika dilakukan melalui pendekatan yang lebih positif, termasuk dalam kaitannya dengan pembinaan politik. Sikap otoriter dalam pembinaan seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya harus dihindari karena hanya akan membuat hilangnya minat kaum muda.

Dorongan untuk merasul oleh kaum dewasa kepada kaum muda perlu dilakukan mengingat bahwa partisipasi aktif kaum muda di bidang sosial dan juga politik saat ini semakin diperlukan. Selain itu, kaum muda juga mempunyai potensi yang luar biasa yang memungkinkan mereka menjadi pembaharu. Dengan adanya

beragam potensi yang dimiliki kaum muda, Gereja melalui kaum dewasa perlu membantu mereka supaya dapat menjadi pembaharu dalam kehidupan menggereja maupun bermasyarakat. Kaum dewasa berperan memperkenalkan sekaligus mendorong kaum muda untuk merasul, termasuk di bidang politik, entah secara langsung (menjadi politisi) maupun tidak langsung (menjadi warga negara yang menjalankan kewajiban politik sebagaimana mestinya).

III. HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN KAUM DEWASA DALAM MENINGKATKAN KERASULAN DI BIDANG POLITIK BAGI KAUM MUDA DALAM TERANG DEKRIT *APOSTOLICAM ACTUOSITATEM* ARTIKEL 12

Peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelaahan tentang pelaksanaan peranan kaum dewasa dalam meningkatkan kerasulan di bidang politik bagi kaum muda dalam terang dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 12 di wilayah Paroki Santo Cornelius dan Paroki Mater Dei Madiun.

Responden penelitian ini terdiri dari enam orang muda dan empat orang dewasa. Kaum muda yang dimaksud ialah sekelompok orang yang berusia antara 19-35 tahun dan belum menikah, yakni mereka yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) hingga hingga Kelompok Muda Karya (KMK) yang terlibat aktif dalam organisasi, baik di lingkup kategorial maupun teritorial paroki. Berikutnya, kaum dewasa ialah sekelompok orang yang berusia antara 35-80 tahun, yakni mereka yang sedang ataupun pernah terlibat aktif dalam politik, termasuk dalam hal memberikan pembinaan politik bagi kaum muda. Semua responden berdomisili di wilayah Paroki Santo Cornelius dan Paroki Mater Dei Madiun.

Hasil analisa data kualitatif mengenai pemahaman responden tentang kerasulan di bidang politik menunjukkan bahwa 9 (90%) responden mengartikan politik sebagai suatu kegiatan di mana terdapat strategi untuk mempertahankan segala yang baik serta memberdayakan dan menggarami masyarakat demi kesejahteraan bersama. 10 (100%) responden mengartikan kerasulan sebagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang kristiani sebagai murid-murid Kristus untuk berfikir, mengaktualisasikan, dan memperjuangkan terwujudnya kebaikan dalam hidup bersama sesuai dengan ajaran

Gereja. Dan 9 (90%) responden berpendapat bahwa politik merupakan bagian dari karya kerasulan Gereja.

Hasil analisa data kualitatif mengenai pemahaman responden tentang minat dan keterlibatan kaum muda dalam bidang politik menunjukkan bahwa 10 (100%) responden berpendapat bahwa minat kaum muda untuk terlibat dalam bidang politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja masih minim. 9 (90%) responden berpendapat bahwa keterlibatan kaum muda dalam bidang politik sebagai karya kerasulan Gereja selama ini masih sangat minim. 7 (70%) responden berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh kaum dewasa dalam membangun minat dan keterlibatan kaum muda di bidang politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja masih belum maksimal.

Hasil analisa data kualitatif mengenai pemahaman responden tentang pelaksanaan peranan kaum dewasa dalam meningkatkan kerasulan di bidang politik bagi kaum muda menurut dekret *Apostolicam Actuositatem* Artikel 12 menunjukkan bahwa 8 (80%) responden berpendapat bahwa sebagai ketetapan Gereja tentang kerasulan awam yang kemudian dijadikan dekret *Apostolicam Actuositatem* merupakan pedoman bagi kaum awam dalam menjalankan karya kerasulan mereka di tengah kehidupan menggereja maupun bermasyarakat. 10 (100%) responden berpendapat bahwa peran kaum dewasa membangun dialog yang baik dengan kaum muda dalam kaitan dengan kerasulan bidang politik selama ini sudah dilaksanakan, tetapi belum efektif. 7 (70%) responden berpendapat bahwa peran kaum dewasa memberikan teladan yang baik dalam hal kegiatan dan kehidupan berpolitik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja sudah dijalankan, hanya saja belum efektif. 7 (70%) responden berpendapat bahwa peran kaum dewasa memberikan nasihat dan bimbingan yang benar dan bijak bagi kaum muda tentang politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja sudah terlaksana, tetapi secara umum belum maksimal. 6 (60%) responden berpendapat bahwa peran kaum dewasa memberikan dorongan bagi kaum muda untuk merasul di bidang politik sudah dijalankan, hanya saja secara umum belum maksimal.

Berikutnya, 6 (60%) responden berpendapat bahwa kaum dewasa sudah berupaya membangun kerjasama diantara mereka untuk membangun semangat kerasulan di bidang politik dalam diri kaum muda, hanya saja belum efektif dan maksimal. 8 (80%) responden berpendapat bahwa wadah yang disediakan oleh Gereja

sudah dimanfaatkan oleh kaum dewasa dengan baik, tetapi belum efektif dan maksimal. 10 (100%) responden berpendapat bahwa ada berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kerasulan di bidang politik bagi kaum muda.

IV. Penutup

Politik merupakan suatu kegiatan di mana terdapat strategi untuk mempertahankan segala yang baik serta memberdayakan dan menggarap masyarakat demi kesejahteraan bersama. Dan kerasulan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-orang kristiani sebagai murid-murid Kristus untuk berfikir, mengaktualisasikan, dan memperjuangkan terwujudnya kebaikan dalam hidup bersama sesuai dengan ajaran Gereja.

Selain sebagai warga Gereja, umat katolik juga merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga negara pada umumnya demi kemajuan Indonesia. Partisipasi politik umat katolik harus senantiasa ditujukan pada tercapainya kesejahteraan yang sejati bagi semua warga, dengan mendorong pemerintah untuk bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah moral.

Minat dan keterlibatan kaum muda untuk terlibat dalam bidang politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja masih rendah, maka kaum muda hendaknya mulai membangun kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam kehidupan berpolitik, bukan justru bersikap apatis. Sikap apatis bukanlah solusi, melainkan jalan pintas yang kemudian akan membuat kondisi politik Indonesia menjadi semakin memburuk. Sementara itu, pelaksanaan peranan kaum dewasa dalam membangun dialog, memberikan keteladanan, memberikan nasihat dan bimbingan yang benar dan bijak, serta mendorong kaum muda untuk merasul di bidang politik sebagai bagian dari karya kerasulan Gereja selama ini masih belum efektif dan maksimal. Maka, beberapa hal yang dianggap telah menghambat efektifitas pembinaan kaum muda di bidang politik selama ini perlu diatasi satu persatu. Salah satunya ialah pentingnya meningkatkan semangat kerjasama diantara kelompok orang dewasa dalam rangka memberikan pembinaan politik kepada kaum muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. 2007. *Politik (La Politica) (Syamsur Irawan Kharie, Penerjemah)*. Jakarta: Visimedia.
- Armada,. 1995. *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- B. Hurlock, Elizabeth. 1990. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Go, Piet. 1991. *Kelompok, Gerakan, Perkumpulan, Organisasi Katolik*. Malang: Dioma.
- Hardawiryana, R. (penerjemah). 2008. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Jacobs, Tom. 1987. *Gereja Menurut Vatikan II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. 1996. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Jakarta: Obor.
- Kristiyanto, Eddy. 2008. *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*. Yogyakarta: Lamalera.
- Liege, A. 1982. *Kedewasaan Duniawi dan Kedewasaan Kristiani*. Yogyakarta. Seri Puskat.
- Lilijawa, Isidores. 2007. *Mengapa Takut Berpolitik?*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Mangunhardjana, AM. 1986. *Pendampingan Kaum Muda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Olla, Paulinus Yan. 2014. *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Piliang, Indra J. (15 Desember 2007). *Kaum Muda Tanpa Kaum. Kompas*: 41.
- Robert, Robertus. 2007. *Republikanisme dan Keindonesiaan, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Marjin Kiri.

- Rosarianto, Hasto. 2003. *SP: Gereja Katolik dalam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pastoral.
- Supriyadi, Agustinus. 2012. *Kaum Muda Katolik, Evangelisasi, dan Kitab Suci*. *JPAK*, Oktober, 5.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tangdilintin, Philips. 1981. *SP No. 53: Menjajaki Arah dan Bentuk Kaderisasi Pembinaan Kaum Muda*. Yogyakarta: Pusat Pastoral.
- , 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius.